

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anwar, Yesmil, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013.

Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Boediono, B. *Perpajakan Indonesia, Jilid I*. Jakarta: Kawula Indonesia, 1996.

Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

James, Simon dan Christopher Nobes. *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall, 1996.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi, 2011.

Nurmantu, Drs. Safri. *Pengantar Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Granit, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku I*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perpektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Penerapan Gizeling Dalam Bidang Perpajakan*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, 2001.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss), 1986.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

Suparnyo. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas Cetakan 3*. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2012.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 133. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 62. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 106. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Berita Negara RI Tahun 2013 No. 984. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain*. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. 8. *Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018*. Direktur Peraturan Perpajakan II Republik Indonesia.

Internet

“Arti kata persamaan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses pada 14 Agustus 2018, <https://kbbi.web.id/sama>.

“Arti kata perubahan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses pada 14 Agustus 2018, <https://kbbi.web.id/ubah>.

“Arti kata wawancara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juli 2018, <https://kbbi.web.id/wawancara>.

finance.detik.com. “Ini Alasan Tarif Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5%”. Jumat, 06 Juli 2018. Diakses tanggal 14 Agustus 2018.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4102465/ini-alasan-tarif-pajak-umkm-dipangkas-jadi-05>.

———. “Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% Memberatkan”. Jumat, 09 Maret 2018. Diakses tanggal 14 Agustus 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3907033/pajak-ukm-turun-jadi-05-djp-1-memberatkan>.
suara.com. “Sarmuji: Revisi UU KUP Bagian Dari Reformasi Perpajakan”. Senin, 03 April 2017. Diakses pada tanggal 15 Juli 2018. <https://www.suara.com/bisnis/2017/04/03/191803/sarmuji-revisi-uu-kup-bagian-dari-reformasi-perpajakan>.

Wikipedia. “Reformasi Perpajakan”. Diakses tanggal 15 Juli 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_perpajakan.